

ANALISIS PERKEMBANGAN KURIKULUM PKN SD

Fitria Adi Ningsih¹, Annisa Khairiyah², Cucu Tri Ayu Ningrum³, Rahmi Khoiriyah⁴,
Abel Christian Sigalingging⁵

Email: ningsihfitriadi@gmail.com¹, annisakhairiyah30@gmail.com², cucuayu21@gmail.com³,
rahmikhoiriyah41@gmail.com⁴, abelchristiansigalingging@gmail.com⁵

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Perkembangan kurikulum bisa sangat dinamis di Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kurikulum PKN Indonesia berkembang dari RPP tahun 1947 menjadi kurikulum belajar mandiri modern tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan di adalah penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah mengalami perkembangan kurikulum yang sangat dinamis sejak kemerdekaannya, dimulai pada tahun , diikuti oleh kurikulum tahun 1947, kurikulum yang dibongkar pada tahun 1952, kurikulum tahun 1964, dan silabus tahun 1968, hingga silabus tahun 1975. Silabus 1984, silabus 1994, dan silabus 1999, silabus 2004, silabus 2006, silabus 2013, dan yang terakhir sejauh ini mengacu pada silabus belajar mandiri tahun 2020 Dalam kasus PPKn, terdapat beberapa perkembangan dinamis yang bersifat normatif dalam perkembangan nomenklatur dan sistem. Kurikulum dalam penamaan saat ini adalah PPKn sebagai yang terbaru, sebelumnya terdapat berbagai nomenklatur seperti PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Kewarganegaraan, dan kemudian dikenal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Kata kunci: Kurikulum, PPKn, merdeka belajar.

ABSTRACT

Curriculum development can be very dynamic in Indonesia. The aim of this study is to examine how the Indonesian Civics curriculum has developed from the 1947 RPP to the modern independent learning curriculum in 2020. The research method used is library research. Based on the research results, Indonesia has experienced very dynamic curriculum development since its independence, starting in year, followed by the 1947 curriculum, the curriculum which was dismantled in 1952, the 1964 curriculum, and the 1968 syllabus, up to the 1975 syllabus. The last one so far refers to the 2020 independent learning syllabus. In the case of PPKn, there are several dynamic developments that are normative in the development of nomenclature and systems. The current naming curriculum is PPKn as the newest, previously there were various nomenclatures such as Civics Education, Citizenship Education, Pancasila Moral Education (PMP), Citizenship Education, and later known as Pancasila and Citizenship Education (PPKn).

Keywords : Curriculum, PPKn, independent learning.

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang dunia pendidikan menjadi topik yang terus ada dari masa ke masa. Di Indonesia, pendidikan merupakan isu sentral dan juga ditetapkan dalam UUD sebagai prioritas utama dalam anggaran negara. Pendidikan sendiri, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan “suatu usaha yang sadar dan disengaja untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar. Pendidik secara aktif mengembangkan potensi, kekuatan spiritual, disiplin diri, budi pekerti, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan bangsanya.” memperhitungkan bahwa konstitusi kita menentukan upaya kita untuk mengembangkan “kemungkinan” banyak hal. Artinya tidak hanya mengembangkan kognitif, tetapi juga psikomotorik dan emosional.

Pembahasan Kurikulum Indonesia sangat menarik. Ini dikarenakan mengalami perubahan yang sangat dinamis seiring dengan berkembangnya kurikulum Indonesia. Bahkan Alhamuddin (2014) menjelaskan: “Perjalanan sejarah sejak Indonesia merdeka pada tahun memiliki ungkapan menarik yang sering muncul ketika penguasa negara berganti: “Pergantian menteri mengubah kurikulum. Pada tahun 1945 sebenarnya kurikulum pendidikan nasional mengalami perubahan berulang kali, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan terakhir pada tahun 2013. Itu kurikulumnya sudah ada pandangan baru terkait dengan kurikulum merdeka belajar.

Pada dasarnya dalam dunia pendidikan, kurikulum merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena pentingnya atau signifikansi kurikulum ini dalam praktiknya, maka jelas bahwa tujuan pendidikan termasuk dalam kurikulum, sehingga pendidik perlu memahami isi kurikulum. Oleh karena itu, khususnya arena itu, proses pendidikan dapat bersifat informatif, interaktif, efektif, dan berjalan lancar (S. Nasution, 1995: 1).

Oleh karena itu, kurikulum tersebut tetap menarik untuk dianalisis pada bidang studi atau mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Lebih lanjut, dalam proses perjalanan dan pengembangan kurikulum, PPKn seringkali mengalami dampak yang cukup signifikan, yaitu adanya perubahan nama bahkan penamaan mata pelajaran tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan analisis perubahan kurikulum yang mungkin bersifat politis, dan terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat dinamis, pemerintah selalu memainkan peran utama dalam proses pengembangan kurikulum ini. Oleh karena itu, peneliti Civic Studies sangat tertarik untuk melakukan analisis terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia khususnya pada bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metodologinya. Penelitian semacam ini mengkaji konsep, teori, atau penemuan dari literatur untuk menawarkan rincian teoritis dan ilmiah tentang meningkatkan pemikiran kritis siswa. Materi sekunder yang terdapat dalam laporan penelitian, buku bacaan ilmiah, jurnal ilmiah, dan website terkait lainnya adalah apa yang telah dikumpulkan dan diperiksa. Selain itu, ada tiga langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian: pengorganisasian, sintesis, dan identifikasi. Investigasi dilakukan untuk menggambarkan bagaimana cara meningkatkan pemikiran kritis siswa pada mata pelajaran pkn. Referensi dicari sebagai sumber informasi selama metode penelitian ini, dan hasilnya kemudian dirangkum untuk menarik penilaian. Metode analisis data kualitatif digunakan. Temuan-temuan tinjauan beberapa penelitian terkait dapat melalui serangkaian proses penelitian.

PEMBAHASAN

Hasil

Data yang di kaji merupakan hasil dari kajian pustaka dari artikel/jurnal yang telah di

review mengenai Kurikulum Pembelajaran PPKn pada Sekolah Dasar dari tahun 1984 hingga kurikulum merdeka. Dari hasil analisis terdapat perbedaan nomenklatur materi PPKn di SD yakni:

1. Pada kurikulum 1984 (Kurikulum 1975 yang disempurnakan) menggunakan nomenklatur PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Materi pada Kurikulum Ini juga menyangkut UUD 1945, lembaga negara, kemerdekaan Indonesia, kerjasama internasional, badan peradilan, hak asasi manusia, asas dan makna keadilan, dan kajian terhadap Pancasila.
2. Kurikulum 1994 menggunakan nomenklatur PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dengan materi pembelajaran Pancasila dalam P4, mencakup nilai, moral dan norma serta nilai-nilai spiritual dan perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara.
3. Kurikulum 2004 KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) menggunakan nomenklatur PKPS (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial). Terintegrasi dengan pelajaran IPS dengan materi pembelajaran Pancasila, persatuan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan, HAM, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, kebutuhan warga negara, dan globalisasi.
4. Kurikulum 2006 KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) menggunakan nomenklatur PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) dengan materi pembelajaran Persatuan dan kesatuan bangsa, norma sosial, perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, konstitusi negara, hak asasi manusia, dinamika kekuasaan politik, dasar negara Pancasila, dan fenomena globalisasi.
5. Kurikulum 2013 menggunakan nomenklatur PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dengan materi pembelajaran Nilai moral Pancasila yang terkandung dalam lambang negara, semangat kebersamaan dalam keberagaman, jenis dan tujuan norma dalam masyarakat, persatuan dan kesatuan bangsa, pemahaman mengenai hak dan kewajiban, makna simbol Pancasila, makna keberagaman, dan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
6. Kurikulum 2020 (Merdeka Belajar) menggunakan Nomenklatur pendidikan pancasila dengan materi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika.

Hasil penelitian literature review disajikan dalam bentuk poin yang menunjukkan perbedaan antara nomenklatur dan materi mata pelajaran PPKn di SD pada setiap kurikulum pembelajaran. Hasil menunjukkan bahwa nomenklatur PPKn berubah seiring dengan pergantian kurikulum pembelajaran, dan materi yang dibahas juga berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, kurikulum merdeka belajar telah dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan kurikulum sebelumnya dan memenuhi persyaratan kurikulum saat ini.

Pembahasan

1. Kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang diperbarui.

Kurikulum 1984 menambah kurikulum 1975. Nama PPKn (Pendidikan Moral Pancasila) tetap digunakan sesuai dengan nama kurikulum 1975 di Kurikulum 1984. Menurut Darmidi (2020), PMP adalah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa di segala tingkat pendidikan. PMP juga berfungsi sebagai dasar pembentukan ideologis dan moral bangsa pada masa Orde Baru. Tujuan dari materi PMP adalah untuk menanamkan ideologi Pancasila. Kurikulum 1984 diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan mempertimbangkan ketiga domain—kognitif, afektif, dan psikomotorik—dalam pendidikan. Model CBSA, atau Cara Belajar Siswa Aktif, digunakan dalam pembelajaran di kelas, di mana siswa diposisikan sebagai subjek pelajaran. Aspek pengetahuan seperti Pancasila dan UUD 1945, hak asasi manusia, keadilan, kemerdekaan Indonesia, kerja sama internasional, lembaga negara, dan badan peradilan adalah bagian dari pelajaran PMP. Kurikulum 1984 memiliki banyak keuntungan dalam pembelajaran PPKn, seperti mengutamakan pendekatan proses, menempatkan siswa sebagai subjek belajar, menanamkan ideologi Pancasila, menciptakan

masyarakat yang taat dan patuh terhadap nilai dan norma Pancasila, dan menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Kurikulum PPKn tahun 1984 memiliki kelemahan karena lebih menekankan aspek kognitif daripada aspek afektif dan psikomotorik. Tujuan PMP belum tercapai, dan materi PMP tumpang tindih dengan pelajaran lain seperti IPS dan sejarah nasional.

2. Kurikulum 1994

Surat Keputusan Mendikbud No.060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar keluar pada tahun 1994. Istilah pelajaran PMP diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai akibat dari perubahan kurikulum. Pendidikan Pancasila memiliki arti yang lebih luas karena mencakup aspek moral selain konsep, nilai, moral, dan norma. Kurikulum 1994 membagi kegiatan pembelajaran di sekolah dasar menjadi tiga catur wulan per tahun ajaran. Materi yang diajarkan di sekolah dasar sangat rumit dan luas. Pelajaran PPKn di sekolah menengah mencakup nilai, moral, norma, dan nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia serta perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada tahun 1999, materi PPKn ditambahkan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan setelah reformasi.

Salah satu keuntungan dari kurikulum 1994 untuk mata pelajaran PPKn adalah fokus pembelajaran untuk membangun karakter dan membangun nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum tersebut juga memperluas penelitian PMP dengan mempertimbangkan konsep, nilai, moral, dan norma yang sesuai dengan Pancasila, dan memperkuat rasa nasionalisme siswa. Berjiwa nasionalis berarti bertindak, berpikir, dan bersikap sesuai dengan prinsip bangsa. Kekurangannya adalah metode pembelajaran dominan hanyalah ceramah. Ini juga kurang terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya dan karena sistem catur wulan menekankan pada mata pelajaran yang padat.

3. Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi

Kurikulum 1994 diganti dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. Pada sekolah menengah, pembelajaran PPKn diintegrasikan secara tematik dengan mata pelajaran IPS menjadi PKPS (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial). Materi PKPS meliputi hak asasi manusia, norma, hukum, dan peraturan, globalisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, konstitusi negara, kebutuhan warga negara, kekuasaan dan politik, dan Pancasila.

Kelebihan dari Kurikulum 2004 pada muatan pelajaran PKPS adalah memungkinkan siswa mempelajari keterampilan PPKn dan IPS yang relevan, memiliki fokus materi pada tema dan konsep yang jelas, banyak kolaborasi dalam pemecahan masalah, meningkatkan keterampilan sosial siswa, dan memungkinkan guru menghemat waktu dan efisien karena PKPS perpaduan dari PPKn dan IPS.

4. Kurikulum 2006 (KTSP)

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum menandai lahirnya kurikulum 2006, juga dikenal sebagai kurikulum KTSP. Pada tahun 2004, kurikulum PKn diubah menjadi Kewarganegaraan. Namun, pada tahun 2006, namanya diubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Isi tidak berubah, tetapi pengembangan kurikulum diserahkan dan menjadi tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan. Pada awalnya, PKn dimasukkan ke dalam kurikulum ini bersama dengan pelajaran IPS. Namun, saat ini, pelajaran ini tidak lagi dimasukkan ke dalamnya dan sekarang merupakan mata pelajaran PKn sendiri. Dalam praktiknya, materi PKn yang diajarkan dalam kurikulum KTSP ini meliputi norma sosial, perundang-undangan, persatuan dan kesatuan bangsa, konstitusi negara, hak asasi manusia, dinamika kekuasaan politik, dasar negara Pancasila, dan fenomena globalisasi.

Kurikulum ini tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendorong kreativitas guru, kepala sekolah, dan manajemen sekolah dalam melaksanakan program pendidikan, sehingga kurikulum menjadi tanggung jawab langsung sekolah. Hal ini

memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan dan menitikberatkan pada materi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

5. Kurikulum 2013

Kurikulum berubah karena Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terpengaruh oleh perubahan dalam kurikulum. Mata pelajaran sebelumnya disebut Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, atau PPKn sekarang. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dirancang untuk mencapai kompetensi inti yang terdiri dari sikap spiritual dan sosial, pengembangan keterampilan (psikomotorik), dan pengembangan sikap (afektif) dan pengetahuan. Secara keseluruhan, penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn dianggap kurang memperhatikan aspek ketatanegaraan dan moral Pancasila.

Materi PPKn dalam pelajaran ini mencakup beberapa topik, seperti nilai moral Pancasila yang terkandung dalam lambang negara, semangat kebersamaan dalam keberagaman, jenis dan tujuan norma masyarakat, persatuan dan kesatuan bangsa, pemahaman hak dan kewajiban, makna simbol Pancasila, makna keberagaman, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik, yang memungkinkan materi PPKn diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, seperti IPA dan Bahasa Indonesia, yang merupakan keuntungan. Metode ini membuat pembelajaran lebih kontekstual atau relevan karena siswa melihat hubungan antara berbagai elemen pembelajaran. Pendekatan tematik tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi juga menjadi kelemahan kurikulum ini karena sulit untuk diterapkan di kelas. Pembelajaran menjadi tidak fokus ketika semua mata pelajaran dilarutkan menjadi satu.

6. Kurikulum 2020 (Merdeka Belajar)

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang SN-Dikti menentukan kurikulum 2020, juga dikenal sebagai kurikulum merdeka belajar. Sebutan PPKn menjadi Pendidikan Pancasila dipengaruhi oleh perubahan kurikulum ini. Namun, muatan pendidikan kewarganegaraan tetap ada dan dimasukkan ke dalam kurikulum Pancasila. Muatan kurikulum tetap dan terintegrasi di dalamnya, hanya nomenklatur yang berubah. Kursi ini berfokus pada tiga prinsip utama gagasan belajar merdeka: akselerasi, keberagaman sebagai esensi, dan profil siswa Pancasila. Menurut Kemendikbud, ada enam karakteristik yang harus dimiliki siswa yang menganut Pancasila: berpikir kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebhinekaan global, dan berakhlak mulia.

Diharapkan profil siswa Pancasila akan meningkatkan karakter siswa terhadap hasil pembelajaran. Secara keseluruhan, materi PPKn yang termasuk dalam kurikulum ini adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Salah satu keuntungan dari kurikulum merdeka belajar untuk PPKn adalah bahwa kurikulum ini memasukkan program penguatan profil pelajar Pancasila. Ini menunjukkan bahwa kurikulum merdeka belajar menjadikan Pancasila sebagai dasar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kekurangannya adalah guru tidak siap untuk menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Ini karena materi PPKn sangat luas dan kurikulum merdeka membutuhkan pembelajaran interaktif.

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) atau Civic Education adalah program pendidikan pembelajaran yang secara programatik-prosedural berupaya memanusiakan (Humanizing) dan membudayakan (Civizing) serta memberdayakan (empowering) manusia dalam hal ini peserta didik, didik diri dan kehidupannya menjadi warganegara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/ yuridis konstitusi bangsa/ Negara yang bersangkutan Sedangkan Kurikulum PKn adalah acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan berfikir secara kritis,

rasional dan Kreatif. di samping itu untuk meningkatkan partisipasi aktif dan rasa bertanggung jawab serta membiasakan bertindak cerdas dalam kegiatan masyarakat dalam memnangani isu-isu kewarganegaraan.

Perkembangan kurikulum PPKn terjadi sangat dinamis, Perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia berkembang secara dinamis ini pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan serta visi-misi dari pemerintah yang mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kekuatan yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Widiatmaka 2022; Prastowo 2018; Fajri et al. 2021; Wardhana 2021; Adabiah 2022; Putra 2022; Raharjo 2020) Adabiah, Rabiatul. 2022. "Hubungan of Educational Technology, Curriculum, Learning and Communication." *Jurnal of Educational Technology, Curriculum, Learning, and Communication* 2: 73–77.
- Fajri, Suryadi, Rilci Kurnia Ilahi, Rilci, Rahmi Yunita, Khairat Arniman, and Deffina Yuliani. 2021. "The National Curriculum in Development in the Reform Period" 6: 33–36. <https://doi.org/10.32698/icftk395>.
- Prastowo, Andi. 2018. "Perubahan Kurikulum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SD/MI Di Indonesia: Dari KTSP Menuju Kurikulum 2013." *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad VIII* (01): 36–52.
- Putra, Ilham Pratama. 2022. "Tak Ada PPKn Lagi Di Kurikulum Merdeka Mulai Tahun Ajaran Baru 2022/2023." *Medcom.Id.* 2022. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/5b2GeEak-tak-ada-ppkn-lagi-di-kurikulum-merdeka-mulai-tahun-ajaran-baru-2022-2023>.
- Raharjo, Raharjo. 2020. "Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 Sampai Dengan Merdeka Belajar 2020." *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan* 15 (1): 63. <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>.
- Wardhana, Ivan Prapanca. 2021. "Review Kurikulum Pendidikan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) Tahun 1984 Dalam Pendidikan Indonesia." *Keraton: Journal of History Education and Culture* 3 (1): 17. <https://doi.org/10.32585/keraton.v3i1.1611>.
- Widiatmaka, Pipit. 2022. "PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DI DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA PESERTA DIDIK." *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5 (1): 1–10.